



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian serta hasil penelitian (jurnal) yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah teruji kebenarannya. Lalu, yang kedua adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, skripsi, thesis, dan disertasi.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran, yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Pada bagian akhir, penulis membahas hipotesis penelitian, yaitu anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan mengacu pada kerangka pemikiran.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen.



Menurut Scott (2015: 358), teori keagenan adalah teori yang mempelajari

desain dari kontrak yang memotivasi agen secara rasional untuk bertindak atas nama prinsipal ketika kepentingan agen disisi lain bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

Hubungan yang timbul antara pemilik (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*) dilandasi karena adanya kontrak. Manajemen sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik atau prinsipal, harus bertanggungjawab atas apa yang telah diamanahkan kepadanya. Di lain pihak, prinsipal sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial. Dari hubungan keagenan tersebut akan timbul konflik antara pemilik dan pihak manajemen ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif pada agen.

Prinsipal tidak dapat memonitori aktivitas agen setiap hari untuk memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Di sisi lain, agen memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen, kondisi ini dinamakan dengan asimetri informasi.

Asimetri informasi dapat mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen itu sendiri. Agen dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Sedangkan bagi prinsipal, akan sulit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajer karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

Konflik yang timbul antara agen dengan prinsipal dapat memunculkan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh agen. Adanya perbedaan kepentingan dimana agen akan berusaha memenuhi target yang diberikan prinsipal karena menginginkan insentif yang telah disetujui dalam kontrak, membuat agen akan menampilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan target dalam kontrak yang disetujui antara agen dan prinsipal. Agen yang belum memenuhi target dari prinsipal akan menggunakan segala cara untuk memenuhi target tersebut salah satunya dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat memengaruhi laba dalam laporan keuangan yang disebut dengan manajemen laba.

2. Teori Akuntansi Positif

Menurut Scott (2003: 273), teori akuntansi positif adalah:

“Positive accounting theory (PAT) is concerned with predicting such actions as the choices of accounting policies by firm managers and how managers will respond to proposed new accounting standard.”

Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal untuk tujuan tertentu.

Teori ini secara khusus berusaha mengungkapkan pengaruh dari variabel-variabel ekonomi terhadap motivasi manajer untuk memilih suatu metode akuntansi.

Prosedur akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberikan kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kebebasan bagi manajer untuk memilih kebijakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

akuntansi membuka peluang bagi manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepentingan mereka.

3. Manajemen Laba

a. Definisi Manajemen Laba

Definisi manajemen laba menurut Scott (2015: 445) :

“Earnings management is the choice by manager of accounting policies so as to achieve some specific objective.”

Menurut Sulistyanto (2008: 51) manajemen laba merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manajer untuk “memengaruhi” dan mengintervensi laporan keuangan perusahaan. sedangkan menurut Nuryaman (2008) manajemen laba adalah tindakan manajer mengatur laba dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginannya.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat di simpulkan manajemen laba adalah tindakan manajer memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, hasil yang diinginkan oleh penyusun laporan keuangan dapat berupa penyajian nilai laba yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk memenuhi tujuan tertentu.

Menurut Sulistyanto (2008: 10) terdapat dua perspektif penting yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh seorang manajer, yaitu:

1) Perspektif Informasi

Perspektif informasi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer tentang arus kas perusahaan dimasa depan. Upaya



mempengaruhi informasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan untuk memilih, menggunakan, dan mengubah berbagai metode dan prosedur akuntansi yang ada. Sebagai contoh adalah metode FIFO, LIFO, dan rata-rata untuk menentukan harga pokok penjualan atau metode depresiasi garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka tahun untuk mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap. Penggunaan metode yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda pula. Oleh sebab itu, manajemen laba dapat dikatakan sebagai permainan akuntansi (*accounting games*)

2) Perspektif Oportunis

Perspektif oportunis merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunis manajer untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Kesenjangan informasi antara manajer dengan pihak lain ini disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetry*). Kesenjangan informasi inilah yang mendorong manajer untuk berperilaku oportunis dalam mengungkapkan informasi-informasi penting mengenai perusahaan. Semakin besar asimetri informasi maka semakin besar dorongan bagi manajer untuk berperilaku oportunis.

b. Motivasi Manajemen Laba

Motivasi manajer melakukan manajemen laba yang dirumuskan menjadi tiga hipotesis oleh Watts and Zimmerman (1990) dalam teori akuntansi positif. Tiga hipotesis tersebut adalah:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang tinggi untuk masa kini.

2) *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian hutang.

3) *The Political Cost Hypothesis*

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik yang tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profiabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

c. Pola Manajemen Laba



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Sulistyanto (2008: 177) terdapat beberapa pola manajemen laba,

yaitu:

(1) *Income Increasing*

Upaya perusahaan mengatur agar laba periode menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.

(2) *Income Decreasing*

Upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada biaya sesungguhnya.

(3) *Income Smoothing*

Upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.

d. Teknik Manajemen Laba

Terdapat tiga teknik dalam melakukan manajemen laba (Gumanti, 2000),

yaitu:

(1) Menggeser periode pendapatan atau biaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menggeser periode biaya atau pendapatan dapat memengaruhi perolehan laba. Contoh : mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan (*revenues*), mempercepat atau menunda pengiriman produk kepada pelanggan.

(2) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara ini merupakan cara manajer untuk memengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi antara lain : estimasi tingkat piutang tak tertagih dan kebijakan mengenai perkiraan umur aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud

(3) Mengubah metode akuntansi

Upaya untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada (*generally accepted accounting principles* atau GAAP) dengan tujuan untuk menaikkan atau menurunkan angka laba. Misalnya : merubah metode depresiasi aktiva tetap dan metode jumlah angka tahun ke metode depresiasi garis lurus, dan merubah metode penilaian persediaan.

e. Model Empiris Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008:7) ada tiga kelompok model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan, yaitu

(1) Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model manajemen laba ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), serta Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995).

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (2) Model yang berbasis *specific accruals*, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson (1988), Petroni (1992), Beaver dan Angel (1996), Beneish (1997), serta Beaver dan McNichols (1998).
- (3) Model *distribution of earnings* dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev (1997), DeGeorge (1999), Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner (1999).

Namun sejauh ini hanya model berbasis *aggregate accrual* yang diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Alasan pertama, model empiris ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang selama ini banyak dipergunakan oleh dunia usaha. Alasan kedua, model *aggregate accrual* menggunakan semua komponen dalam laporan keuangan untuk mendeteksi rekayasa keuangan.

Penelitian ini menggunakan model Jones dimodifikasi dari Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995). Model Jones dimodifikasi adalah model yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang salah dari model Jones untuk menentukan akrual diskresioner ketika diskresi melebihi pendapatan. Model ini menggunakan akrual diskresioner sebagai proksi manajemen laba dimana pendapatan perusahaan disesuaikan dengan perubahan piutang yang terjadi pada periode tersebut. Kelebihan pada model Jones dimodifikasi ini yaitu memecah akrual menjadi empat komponen utama, yaitu discretionary current accrual, nondiscretionary current accrual,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



discretionary long term accrual, dan nondiscretionary long term accrual.

- Ⓒ Discretionary current accrual dan nondiscretionary current accrual merupakan akrual yang berasal dari aktiva lancar. Sedangkan aktiva tidak lancar menjadi sumber discretionary long term accrual dan nondiscretionary long term accrual.

$$DA_t = \frac{TA_t}{A_{t-1}} - NDA_t$$

TA_t	= Total <i>Accrual</i> dalam periode t
A_{t-1}	= Total Aktiva dalam periode t-1
NDA_t	= <i>Non-Discretionary Accrual</i> dalam periode t
DA_t	= <i>Discretionary Accrual</i> dalam periode t

4. Corporate Governance

a. Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Konflik yang terjadi antara prinsipal dan agen dalam teori agensi dapat diminimumkan dengan melakukan mekanisme *monitoring* yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dan menyelaraskan berbagai kepentingan. Mekanisme untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) (Nuryaman, 2008).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan moral, etika, budaya, dan aturan berlaku lainnya (*Indonesian Institute for Corporate Governance/IICG*). Mekanisme *corporate governance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



di perusahaan diyakini akan membatasi pengelolaan laba yang oportunistik oleh manajemen (Siregar dan Utama, 2005).

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Asas-asas ini harus dipastikan berada dalam perusahaan karena prinsip *corporate governance* memengaruhi pengambilan keputusan-keputusan dalam perusahaan, terutama prinsip transparansi.

Asas-asas *Good Corporate Governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006):

(1) Keterbukaan (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

(3) Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesian*) dalam Pradana (2015) penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat, yaitu

- (1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*;
- (2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih rendah sehingga akan meningkatkan *corporate value*;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia;

(4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan deviden.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Mekanisme Corporate Governance

(1) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan oleh institusi yang lainnya (Mahariana dan Ramantha, 2014). Terdapat dua jenis investor institusional, yaitu investor institusional sebagai *transient investors* (pemilik sementara perusahaan) dan investor institusional sebagai *sophisticated investors* (Chew dan Gillan, dalam Agustia 2013). Dengan kepemilikannya yang besar, investor institusional merupakan pihak yang diharapkan dapat mengontrol pekerjaan manajemen, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba perusahaan menjadi berkurang.

Penelitian Tarjo (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya, semakin tinggi kepemilikan oleh pihak institusional akan meminimalisir terjadinya manajemen laba. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Jao dan Pagalung (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya, dengan bertambahnya kepemilikan institusional akan meningkatkan tindakan manajemen laba.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Komite Audit

Komite audit adalah komite yang memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (Jao dan Pagalung, 2011). Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit yang bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit harus berjumlah paling kurang tiga (3) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen (Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep-643/BL/2012, 2012).

Komite audit adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas (Sulistyanto, 2008:156). Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006):

- (a) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (b) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- (c) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- (d) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Dengan adanya komite audit menjadikan performa auditor menjadi lebih independen dan dapat diandalkan karena praktek kolusi antara

manajemen dengan auditor menjadi lebih sulit untuk dilakukan (Watts dan Zimmerman, 1983).

(3) Kualitas Audit

Kualitas audit adalah probabilitas auditor perusahaan akan menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi dan melaporkan pelanggaran tertentu (DeAngelo, 1981). Kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas pelaporan keuangan perusahaan karena dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan kepercayaan investor juga akan meningkat (Christiani dan Nugrahanti, 2014).

DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran KAP, dengan proksi untuk ukuran KAP adalah jumlah klien. KAP besar (*Big Four*) adalah perusahaan audit yang paling banyak memiliki banyak klien. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KAP *Big Four* akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP kecil. Karena KAP *Big Four* akan kehilangan reputasinya jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar yaitu dengan kehilangan klien. Auditor yang bekerja di KAP *Big Four* juga dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP *non-Big Four* (Guna dan Herawaty, 2010).

(4) Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi (Jao dan Pagalung, 2011). Diantara tugas dan tanggung jawab dari dewan komisaris independen antara lain untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi), mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku, serta menjamin bahwa prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance telah dipatuhi dan diterapkan dengan baik (Sulistyanto, 2008:144).

Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEI), nomor: KEP-339/BEJ/07-2001, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki:

- (a) Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris;
- (b) Komite Audit;
- (c) Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5 Pajak

a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli (dalam Waluyo, 2013: 2-3):

(1) Menurut P. J. A. Adriani:

“Pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

(2) Menurut Edwin R. A. Seligman:

“Tax is compulsory contribution from the person to the government to depay the expense incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”

(3) Menurut Soeparman Sormahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

(4) Menurut Rochmat Soemitro:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

b. Ciri-ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2016: 2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.



- (3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

(1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi Regulator

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

6. Beban Pajak Tangguhan

Perbedaan penghitungan laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal) mengharuskan wajib pajak melakukan rekonsiliasi fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak (Siti Resmi, 2016: 385). Hal ini membuat pajak terutang antara komersial dan fiskal menjadi beda. Perbedaan besarnya pajak terutang tersebut harus dilakukan dengan membuat jurnal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penyesuaian yang akan berpengaruh pada besarnya rekening hutang pajak dan juga mempengaruhi besarnya laba setelah pajak yang diakui oleh perusahaan dalam laporan laba rugi. Atas perubahan tersebut, perusahaan harus melakukan revisi posisi neracanya.

Pajak tangguhan timbul sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan (Siti Resmi, 2016: 389).

Pajak tangguhan terbagi menjadi dua, yaitu aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau besar.

Beban pajak tangguhan merupakan hasil dari pengakuan koreksi fiskal negatif. PSAK No. 46 (Revisi 2010) mendefinisikan beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Saat terjadi koreksi negatif, perusahaan mengakui kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan ini dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan hasilnya diakui sebagai beban pajak tangguhan. Sebaliknya, jika terjadi koreksi fiskal positif, perusahaan akan mengakui aktiva (aset) pajak tangguhan. Aktiva (aset) pajak tangguhan ini dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan hasilnya diakui perusahaan sebagai manfaat pajak tangguhan. Baik beban maupun manfaat pajak tangguhan akan ditambah atau dikurangi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beban atau manfaat pajak kini untuk mendapatkan jumlah beban pajak penghasilan perusahaan.

Tabel 2.1
Penyajian beban (manfaat) pajak tangguhan dalam laporan keuangan

Laba komersial sebelum pajak	xxx
Pajak Penghasilan :	
Pajak Kini xxx	
Pajak Tangguhan (+/-) <u>xxx</u>	
Total pajak penghasilan	<u>(xxx)</u>
Laba komersial bersih	xxx

7. Size

Ukuran perusahaan (*size*) adalah pengklasifikasian besar kecil perusahaan menjadi suatu skala dengan menggunakan berbagai cara, antara lain: *log size*, total aktiva, nilai pasar saham dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) (Anggraini, 2012).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada manajemen laba. Ada dua pandangan tentang bentuk ukuran perusahaan. Pertama, Menurut Nasution dan Setiawan (2007) praktik manajemen laba lebih banyak dilakukan oleh perusahaan yang berukuran kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Alasannya adalah perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan kepada investor bahwa perusahaan selalu berkinerja baik dan memperoleh laba yang besar sehingga membuat investor yakin untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Sementara perusahaan yang lebih besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan karena diperhatikan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



masyarakat sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Kedua, Menurut Watts dan Zimmerman (1990) mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi lebih cenderung memilih metode akuntansi sebagai salah satu cara untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
Dian Agustia (2013)	Pengaruh Faktor <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Free Cash Flow</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba	1. Komite Audit (X1) 2. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X2) 3. Kepemilikan Institusional (X3) 4. Kepemilikan Manajerial (X4) 5. <i>Free Cash Flow</i> (X5) 6. <i>Leverage</i> (X6) 7. Manajemen Laba (Y)	Analisis Regresi Berganda	Komite Audit, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. <i>Free cash flow</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.



Phillips et al. (2003)	<i>Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense</i>	1. <i>Deferred Tax Expense (X)</i> 2. <i>Earnings Management (Y)</i>	Metode Deskriptif Analisis	<i>Deferred tax expense</i> berpengaruh terhadap <i>earnings management</i> .
Anggi Ratna Angraeni (2012)	Pengaruh Siklus Hidup dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	1. Siklus Hidup Perusahaan (X1) 2. Ukuran Perusahaan (X2) 3. Manajemen Laba (Y)	Analisis Regresi Berganda, Metode Deskriptif Analisis, dan Analisis <i>Multiple Regression</i>	Siklus hidup perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba.
Robert Jao dan Garing Pagalung (2011)	<i>Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia</i>	1. Kepemilikan Manajerial (X1) 2. Kepemilikan Institusional (X2) 3. Ukuran Dewan Komisaris (X3) 4. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X4) 5. Ukuran Perusahaan (X5) 6. <i>Leverage (X6)</i> 7. Manajemen Laba (Y)	Metode Deskriptif Analisis dan Analisis Regresi Berganda	Kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisari independen, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Dan <i>leverage</i> tidak mempunyai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak ditamlik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)				pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
	Comett et al. (2009)	<i>Corporate Governance and Earnings Management at Large U.S. Bank Holding Companies</i>	1. <i>Corporate Governance</i> (X) 2. <i>Earnings Management</i> (Y)	Analisis Regresi Berganda <i>Corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>earnings management</i>.
	Nuryaman (2008)	Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba	1. Konsentrasi Kepemilikan (X1) 2. Ukuran Perusahaan (X2) 3. Komposisi Dewan Komisaris (X3) 4. Kualitas Audit (X4) 5. Manajemen Laba (Y)	Analisis Regresi Berganda dan Metode Deskriptif Analisis Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
	Christiani dan Nugrahanti (2014)	Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba	1. Ukuran KAP (X1) 2. Spesialisasi Industri Auditor (X2) 3. Manajemen Laba (Y)	Analisis Regresi Berganda dan Metode Deskriptif Analisis Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
	Guna dan Herawaty (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Independensi Auditor, Kualitas Audit	1. Kepemilikan Institusional (X1) 2. Kepemilikan Manajerial (X2) 3. Komite Audit (X3)	Analisis Regresi Berganda dan Metode Deskriptif Analisis Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba	4. Komisaris Independen (X4) 5. Independensi Auditor (X5) 6. <i>Leverage</i> (X6) 7. Kualitas Audit (X7) 8. Profitabilitas (X8) 9. Ukuran Perusahaan (X9) 10. Manajemen Laba (Y)		independensi auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. <i>Leverage</i> , profitabilitas, dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba.
	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba	1. Komite Audit (X1) 2. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X2) 3. Kepemilikan Manajerial (X3) 4. Kepemilikan Institusional (X4) 5. Kualitas Auditor (X5) 6. Manajemen Laba (Y)	Analisis Regresi Berganda dan Metode Deskriptif Analisis	Komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba.
	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	1. Beban Pajak Tangguhan (X1) 2. Perencanaan Pajak (X2) 3. Manajemen Laba (Y)	Analisis Regresi Berganda dan Metode Deskriptif Analisis	Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *corporate governance*, beban pajak tangguhan dan *size* terhadap manajemen laba.

1. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba

Corporate governance merupakan salah satu upaya untuk mengeliminir manajemen laba dalam pengelolaan dunia usaha (Sulistyanto, 2008: 154). Untuk itu salah satu kunci utama untuk mewujudkan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab adalah dengan membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Terwujudnya keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sebuah perusahaan akan mendorong terciptanya keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan perusahaan, serta menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pribadi dan mengabaikan kepentingan dan kebutuhan publik.

Berdasarkan hasil penelitian Tarjo (2008) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sementara penelitian Jao dan Pagalung (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian Pradipta dan Susanto (2012) diketahui bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Komite audit dapat menjalankan tugasnya dalam memonitor pelaporan keuangan sehingga keberadaan komite audit dapat mendeteksi manajemen laba.

Berdasarkan hasil penelitian Guna dan Herawaty (2010) diketahui bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini membuktikan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kualitas audit yang diproksikan oleh ukuran KAP, yaitu KAP *Big Four* dan KAP *non-Big Four*. Semakin berkualitas audit suatu perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung untuk tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan tertentu. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian Jao dan Pagalung (2011) diketahui bahwa proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba, penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Andini dan Sulistyanto (2011). Ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka akan menurunkan manajemen laba.

2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan merupakan komponen dari total beban pajak penghasilan perusahaan dan mencerminkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak) yang muncul akibat akrual dari item-item pendapatan dan beban yang memengaruhi laba baik secara komersial maupun fiskal, tetapi dalam periode yang berbeda. Saat terjadi koreksi negatif, perusahaan mengakui kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan ini dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan hasilnya diakui sebagai beban pajak tangguhan. Sebaliknya, jika terjadi koreksi fiskal positif, perusahaan akan mengakui aktiva (aset) pajak tangguhan. Aktiva (aset) pajak tangguhan ini dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan hasilnya diakui perusahaan sebagai manfaat pajak tangguhan.

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajer dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diperbolehkan menurut peraturan perpajakan (Yulianti, 2005). Penggunaan asumsi dapat merupakan suatu usaha manajemen laba oleh manajer perusahaan (Febriyanti dan Hanna, 2014). Dengan demikian beban pajak tangguhan yang timbul dapat dijadikan sebagai indikator usaha manajer untuk melakukan manajemen laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2013) dan Phillips *et al.* (2003) menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan. Sementara hasil penelitian Amanda dan Febrianti (2015) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh Size terhadap Manajemen Laba

Terdapat dua hubungan antara *size* atau ukuran perusahaan dengan manajemen laba. Pertama, praktik manajemen laba lebih banyak dilakukan oleh perusahaan yang berukuran kecil dibandingkan dengan perusahaan besar.

Alasannya adalah perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan kepada investor bahwa perusahaan selalu berkinerja baik dan memperoleh laba yang besar sehingga membuat investor yakin untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Sementara perusahaan yang lebih besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan karena diperhatikan oleh masyarakat sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Kedua, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi lebih cenderung memilih metode akuntansi sebagai salah satu cara untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

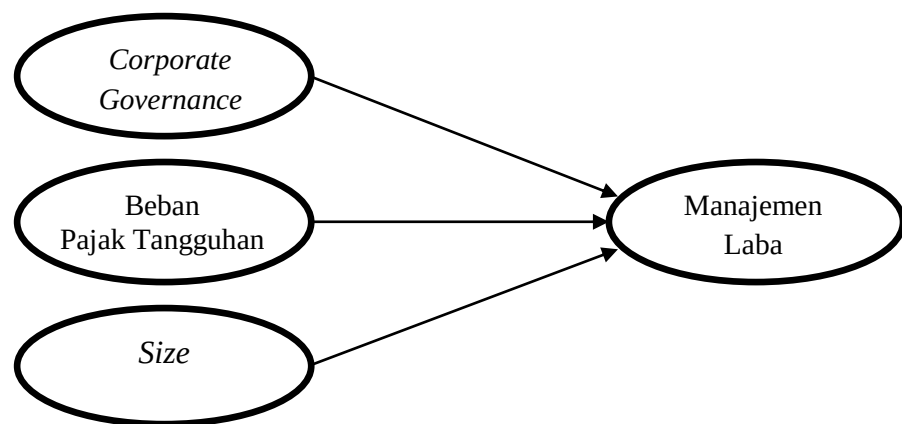


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011) dan Cornett

et al. (2009) mendapatkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Guna dan Herawaty (2010) serta Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa size atau ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Ha2 : *Beban Pajak Tangguhan* berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Ha3 : *Size* berpengaruh terhadap Manajemen Laba.